



Uang Saku

Perjalanan Dinas

Eksekutif Juga Naik

YOGYAKARTA – Usulan menaikkan uang saku perjalanan dinas (perdin) ke luar kota ternyata tak hanya untuk agenda anggota DPRD Kota Yogyakarta. Penambahan uang saku juga diperuntukkan bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

"Masih dipelajari di Bagian Organisasi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Rabu (8/3).

Uang saku perdin eksekutif dan legislatif Kota Yogyakarta sebenarnya sudah dinaikkan pada Agustus 2016. Kenaikan

tersebut menyesuaikan Peraturan Gubernur DIY No 37/2016 soal Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang termasuk di dalamnya komponen uang saku perdin ke luar kota. Serta Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rata-rata kenaikan uang saku sebanyak dua kali lipat dari jumlah semula. Untuk kalangan eksekutif, berbeda-beda jumlahnya, bergantung jenjang karier. Misalnya kepala daerah, saat ini menerima uang saku harian perdin luar kota sebesar Rp1.100.000. Pejabat eselon II sekitar Rp900.000-1 juta per hari. Eselon III mendapat Rp850.000.

Meski demikian, kenaikan tersebut tercatat baru pertama kali sejak 2004. "Usulan kenaikan kali ini berapa, masih dipelajari. Termasuk usulan dari Dewan. Yang jelas, tak mengubah pagu anggaran, hanya merevisi beberapa komponen yang bisa dikurangi," kata Kadri. Jika disepakati, regulasi

anyar harus dibentuk. Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 110/2016 tentang SHBJ akan direvisi pasal-pasal yang mengatur komponen perjalanan dinas.

Diketahui, anggota DPRD Kota Yogyakarta minta jatah uang saku perdin tahun ini dinaikkan. Usulan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (7/3).

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan, usulan menaikkan uang saku didasarkan pada perbandingan dengan uang saku perdin anggota Dewan di empat kabupaten lain di DIY. Karenaitu, meskipun sejak trivulan terakhir 2016

uang saku sudah naik dua kali lipat menjadi rata-rata Rp1 juta per hari, nominalnya masih di bawah kabupaten lain.

"Keinginan kami hanya ingin menyesuaikan angkanya dengan kabupaten lain. Apalagi Kota Yogyakarta kan ibu kota provinsi," katanya.

Sujanarko optimistik, usulan tersebut akan disetujui eksekutif karena hanya merevisi beberapa komponen perdin yang sudah dianggarkan tanpa mengubah pagu anggaran secara keseluruhan.

Nominal yang diajukan, dia akui, sama dengan Kabupaten Sleman, yaitu Rp1,7 juta per hari.

ristu hanafi

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui
Netral	☒ Biasa	☐ Jumpa Pers
v Netral		

- BPKAD Yogyakarta,
Plt. Kepala Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005